

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN  
KESEHATAN PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Derajat Sarjana S-2

Program Studi Magister Hukum Kesehatan



Diajukan oleh:

**Weni Cindi Klara**

**NIM : 18.C2.0031**

**FAKULTAS PASCASARJANA HUKUM KESEHATAN  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA  
SEMARANG**

**2021**

## HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Weni Cindi Klara  
Program Studi : Pascasarjana Hukum Kesehatan  
Fakultas : Hukum Kesehatan  
Jenis Karya : TESIS

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata Semarang Hak Bebas Royalti Noneklusif atas karya ilmiah yang berjudul “Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan Di Kabupaten Musi Rawas Utara” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 April 2021

yang menyatakan



Weni Cindi Klara

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN  
KESEHATAN PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN  
DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

Diajukan oleh :

Weni Cindi Klara

NIM : 18.C2.0031

telah disetujui oleh :

Pembimbing Pertama



Dr.dr. I Edward Kurnia SL, MM.,MH.Kes.,Sp.PK(K),Msi.Med

Tanggal 29 April 2021

Pembimbing Kedua



Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH

Tanggal 29 April 2021



## HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tugas Akhir: : Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan Di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Diajukan oleh : Weni Cindi Klara

NIM : 18.C2.0031

Tanggal disetujui : 29 April 2021

Telah setuju oleh

Pembimbing 1 : Dr.dr. I Edward Kurnia SL, MM.,MH.Kes.,Sp.PK(K),Msi.Med.

Pembimbing 2 : Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH.

Penguji 1 : Dr.dr. I Edward Kurnia SL, MM.,MH.Kes.,Sp.PK(K),Msi.Med.

Penguji 2 : Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH.

Penguji 3 : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Ketua Program Studi : Dr. Y. Endang Wahyati S.H., M.H.

Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.



Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

[sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C2.0031](http://sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C2.0031)



**LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA**

**Nomor** : 0047 /SK.Rek/X/2013  
**Tanggal** : 07 Oktober 2013  
**Tentang** : PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

**PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis yang berjudul :  
“ PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN  
PADA PRAKTIK MANDIRI BIDAN DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA “  
ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar  
kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya  
juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan  
oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan  
disebutkan dalam daftar pustaka.  
Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa tesis ini sebagian atau  
seluruhnya merupakan *hasil plagiasi*, maka saya rela untuk dibatalkan,  
dengan segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada  
Universitas Katolik Soegijapranata dan/ atau peraturan perundang-  
undangan yang berlaku.

Semarang, 29 April 2021



(Weni Cindi Klara)  
NIM : 18.C2.0031

\*) : hilangkan yang tidak sesuai

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **Perlindungan Hukum Pasien dalam Pelayanan Kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara**. Tesis ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan dan memperoleh gelar magister hukum kesehatan pada Program Studi Magister Hukum Kesehatan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Penyusunan tesis ini dapat terselesaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. F. Ridwan Sanjaya, MS.IEC, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menempuh Program Studi Magister Hukum Kesehatan.
2. Dr. Marcella Elwina Simanjuntak, SH., CN., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata Semarang.
3. Dr. Endang Wahyati Yustina, SH., MH., Ketua Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang dan sebagai dosen penguji yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan memberikan arahan, saran dan masukan yang membangun dalam memperbaiki tesis ini.
4. Dr.dr. I Edward Kurnia SL, MM., MH.Kes., Sp.PK(K), Msi.Med, sebagai dosen pembimbing I yang selalu memberikan waktu, tenaga dan ilmunya untuk memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingannya dengan sabar sehingga terselesainya tesis ini.
5. Ignatius Hartyo Purwanto, SH., MH., Sekretaris Program Studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang dan sebagai dosen pembimbing II yang selalu meluangkan waktu, tenaga dan ilmunya untuk memberikan arahan, saran, dorongan dan bimbingan dengan sabar sehingga terselesainya tesis ini.
6. Bapak/ Ibu dosen dan seluruh staf Program Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang.

7. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas PMPTSP dan Ketua IBI cabang Kabupaten Musi Rawas Utara yang telah memberikan dukungan dan masukan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua dan keluarga besar yang sudah mendoakan serta mendukung penulis dalam proses penyelesaian tesis ini.
9. Terima kasih juga buat para ibu Bidan Praktik Mandiri yang telah bersedia meluangkan waktu dan kesempatan untuk penelitian di PMB.
10. Terima kasih buat teman-teman Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata khususnya angkatan XXIX.
11. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari dalam penyusunan tesis ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk kesempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bisa bermanfaat dan memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum kesehatan bidang kebidanan.

Semarang, 29 April 2021

Peneliti,



Weni Cindi Klara

18.C2.0031

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ivi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN.....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah .....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Metode Penelitian .....	13
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Spesifikasi Penelitian .....	14
3. Obyek Dan Subyek Penelitian .....	14
4. Jenis Data.....	15
5. Metode Pengumpulan Data.....	17
6. Metode <i>Sampling</i> .....	18
7. Metode Analisis Data.....	20
G. Kerangka Konsep Penelitian.....	21
H. Sistematika Penyusunan Tesis.....	22



<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>24</b>
A. Perlindungan Hukum.....	24
B. Bidan Dan Pasien.....	30
C. Hubungan Hukum Bidan Dan Pasien.....	43
D. Pelayanan Kesehatan.....	50
E. Fasilitas Pelayanan Kesehatan.....	55
F. Praktik Mandiri Bidan.....	56
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>59</b>
A. Hasil Penelitian.....	59
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Dan Praktik Mandiri Bidan Di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	59
2. Hasil Wawancara Dengan Informan Penelitian.....	62
3. Hasil Wawancara Dengan Responden.....	74
B. Pembahasan.....	85
1. Pengaturan Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan.....	85
2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan Di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	102
3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Pasien Dalam Pelayanan Kesehatan Pada Praktik Mandiri Bidan Di Kabupaten Musi Rawas Utara.....	127
<b>Bab IV Penutup.....</b>	<b>130</b>
A. Kesimpulan.....	130
B. Saran.....	132
<b>Daftar Pustaka.....</b>	<b>134</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Konsep .....	20
Gambar 2. Penyelesaian Sengketa Bidan Praktik Mandiri dengan Pasien Melalui Mekanisme Pelaporan Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara .....	113
Gambar 3. Penyelesaian Sengketa Antara Bidan dan Pasiennya Melalui Mekanisme Gugatan Perdata.....	115



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Tenaga Kesehatan Menurut Kualifikasi di Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2018 .....	51
Tabel 2. Persyaratan Praktik Mandiri Bidan Berdasarkan Lampiran PMK Nomor 28 tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan .....	61
Tabel 3. Aturan Papan Nama Praktik Mandiri Bidan Berdasarkan Pasal 38 PMK Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Kebidanan.....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Alur Perizinan dan Non Perizinan di Dinas PMPTSP Kabupaten Musi Rawas Utara
- Lampiran 2. Surat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Musi Rawas Utara
- Lampiran 3. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Utara
- Lampiran 4. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas Utara
- Lampiran 5. Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Ikatan Bidan Indonesia Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara
- Lampiran 6. Surat Persetujuan Menjadi Informan, Responden dan Daftar Pertanyaan Wawancara



## DAFTAR SINGKATAN



Dinkes	: Dinas Kesehatan
Faskes	: Fasilitas Kesehatan
IBI	: Ikatan Bidan Indonesia
IUD	: <i>Intrauterine Device</i> (Alat Kontrasepsi dalam Rahim)
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
OP	: Organisasi Profesi
Pemda	: Pemerintah Daerah
Perbup	: Peraturan Bupati
Perda	: Peraturan Daerah
PMB	: Praktik Mandiri Bidan
PMK	: Peraturan Menteri Kesehatan
PMPTSP	: Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PP	: Peraturan Pemerintah
Puskesmas	: Pusat Kesehatan Masyarakat
RSUD	: Rumah Sakit Umum Daerah
SIPB	: Surat Izin Praktik Bidan
SOP	: Standar Operasional Prosedur
STR	: Surat Tanda Registrasi
STRB	: Surat Tanda Registrasi Bidan
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
WHO	: <i>World Health Organization</i>



## ABSTRAK

Praktik Mandiri Bidan adalah tempat pelaksanaan rangkaian kegiatan pelayanan kebidanan yang dilakukan secara perorangan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dilakukan sesuai kewenangan dan kompetensi bidan serta sesuai standar kebidanan, bidan dalam melakukan pelayanan kesehatan hanya boleh memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien ibu dan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan perlindungan, pelaksanaan serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan pada Praktik Mandiri Bidan di Kabupaten Musi Rawas Utara.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan dengan wawancara mendalam terhadap informan dari Dinas PMPTSP, Dinas Kesehatan dan Ketua IBI Cabang Kabupaten Musi Rawas Utara dan Responden yaitu Bidan dan Pasiennya. Data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan ketentuan tentang peraturan perlindungan hukum pasien lebih cenderung mengarah kepada upaya perlindungan hukum preventif berupa jaminan keamanan dan manfaat bagi pasien dan belum mengatur secara detail terkait pembayaran ganti rugi kepada pasien. UU Kesehatan *jo* UU Tenaga Kesehatan hanya mengatur adanya hak pasien untuk menuntut ganti rugi kepada bidan, namun tidak ada rincian lebih lanjut dalam peraturan turunannya. Berdasarkan pelaksanaannya, masih terdapat kesenjangan antara ketentuan UU Kebidanan dan PMK Nomor 28 Tahun 2017 dengan praktiknya dilapangan. Perlindungan terhadap hak pasien di PMB belum optimal. Bentuk perlindungan kepada pasien lebih cenderung kepada upaya perlindungan hukum preventif. Subjek pelaksana pemberi perlindungan hukum belum melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya sehingga kurang optimalnya penegakan perlindungan hukum pasien. Sedangkan faktor pengahambatnya adalah pasien yang menganggap bidan sama dengan dokter, ruang praktik bidan yang belum sesuai ketentuan. Faktor pendukungnya adalah murahnya biaya pengobatan yang diberikan dan patuhnya pasien kepada bidan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pasien, dan Praktik Mandiri Bidan,

## ABSTRACT

Midwives Independent Practice is a place to carry out a series of midwifery service activities that are carried out individually. Health services provided to patients are carried out according to the authority and competence of midwives and according to midwifery standards, midwives in providing health services are only allowed to provide health services to maternal and child patients. This study aims to identify and analyze the protection arrangements, implementation and factors that affect the legal protection of patients in obtaining health services at the Midwives Independent Practice in Musi Rawas Utara Regency.

This study uses a sociological juridical approach with analytical descriptive specifications. The data used are primary data and secondary data obtained from field studies and literature studies. The field study was carried out by in-depth interviews with informants from the PMPTSP Office, public health Office and the Head of IBI Branch of Musi Rawas Utara Regency and respondents, namely midwives and their patients. Data were analyzed qualitatively and presented descriptively.

The results showed that the provisions regarding patient legal protection regulations are more likely to lead to preventive legal protection efforts in the form of security guarantees and benefits for patients and have not regulated in detail regarding compensation payments to patients. The Health Law in conjunction with the Health Workforce Law only regulates the right of patients to claim compensation from midwives, but there are no further details in the derivative regulations. Based on its implementation, there is still a gap between the provisions of the Midwifery Law and PMK Number 28 of 2017 and its practice in the field. Protection of patient rights at PMB is not optimal. The form of protection for patients tends to be towards preventive legal protection. The subject of implementing legal protection has not carried out its function properly so that the enforcement of patient legal protection is not optimal. While the inhibiting factors are patients who think midwives are the same as doctors, midwife practice rooms that are not yet in accordance with the provisions. The supporting factors are the low cost of medical treatment provided and the patient's compliance with the midwife.

Keywords: Legal Protection, Patients, and Midwives Independent Practices.